

Isu Strategis : Pengentasan Kemiskinan

LAPORAN PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL



**IDENTIFIKASI KEMISKINAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGANNYA DI TAPANULI BAGIAN SELATAN
(TAEAGSEL) PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh :

Drs. Thamrin, M.Si

Dr. M. Yusuf, M.Si

OK Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak

Dibiayai Oleh DIPA UNIMED T.A 2009
Dengan Surat Perjanjian Kerja untuk Penelitian Hibah Penelitian Strategis Nasional
Nomor : 0187.0/023-04.2/II/2009

**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOPEMBER. 2009**



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)

J. Willem Iskandar Psr.V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221 telp. (061) 6613265, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 - 6613319

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 3899/H33.17/SPMK/2009
Tanggal : 16 Juli 2009

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam belas, bulan Juli, tahun Dua ribu sembilan, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. Wildansyah Lubis, M.Pd. : Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 754/A.A3/KU/2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggara Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi, bertindak untuk dan atas nama Rektor untuk selanjutnya dalam SPMK ini disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. Thamrin, M.Si. : Dosen FE Unimed, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara (2310.0036), MAK 521219; Rekening pada Bank BNI Cabang Medan No. A/C : 0057690837 untuk selanjutnya dalam SPMK ini disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja untuk melakukan penelitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unimed Nomor : 0206/H33/KEP/PL/2009, tanggal 03 Juli 2009 yang dibiayai dari DIPA Unimed Tahun Anggaran 2009 untuk Penelitian Strategis Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan "Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara" yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan masa kerja 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2009.

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPMK ini, yaitu :

1. Sesuai dengan proposal yang diajukan
2. UU RI No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
3. UU RI No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
4. UU RI No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

PASAL 3 PENGAWASAN

Untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan adalah Lembaga Penelitian Unimed dan Tim Sistem Pengendalian Internal (SPI) Unimed.



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)

Jl. Willem Iskandar Psr.V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221 telp. (061) 6613265, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 - 6613319

PASAL 4 NILAI PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi dana pelaksanaan "Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara" tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang dibebankan kepada dana DIPA APBN Unimed T.A. 2009 Nomor : 0187.0/023-04.2/II/2009, tanggal 31 Desember 2008 Program Pendidikan Tinggi, dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut :

1. Tahap I (Pertama) sebesar 70%, yaitu Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), dibayar sewaktu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap II (Kedua) sebesar 30%, yaitu Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara dimaksud dalam Pasal 1 SPMK ini selambat-lambatnya tanggal 14 Nopember 2009

PASAL 6 LAPORAN

1. PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Akhir Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 8 (delapan) eksemplar beserta Soft Copy.
2. PIHAK KEDUA harus menyampaikan naskah artikel hasil penelitian dalam bentuk compact disk (CD) untuk diterbitkan pada Jurnal Nasional terakreditasi dan bukti pengiriman disertakan dalam laporan.
3. Sebelum laporan akhir penelitian diselesaikan PIHAK KEDUA melakukan diseminasi hasil penelitian melalui forum yang dikordinasikan oleh Pusat Penelitian yang sesuai dan pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
4. Seminar Penelitian dilakukan di jurusan/program studi dengan mengundang dosen dan mahasiswa sebagai peserta seminar serta diketahui oleh Pusat Penelitian.
5. Bahan dan laporan pelaksanaan Seminar dimaksud disampaikan ke Lembaga Penelitian Unimed sebanyak 2 (dua) eksemplar.
6. Peserta seminar terbaik dari setiap jurusan wajib menyeminarkan hasil penelitian di Lembaga Penelitian Unimed.
7. Bukti Pengeluaran keuangan menjadi arsip pada PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap dilaporkan ke Unimed dalam bentuk laporan penggunaan dana penelitian paling lambat tanggal 14 Nopember 2009.
8. Sistematika Laporan Akhir Penelitian Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran Kertas Quarto
 - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan Dirjen Dikti.
 - c. Dibawah bagian kulit/cover depan ditulis dibiayai dari DIPA Unimed T.A. 2009, Nomor : 0187.0/023-04.2/II/2009, tanggal 31 Desember 2008.



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)

Jl. Willem Iskandar Psr.V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221 telp. (061) 6613265, 6613276, 6618754, Fax. (061) 6614002 - 6613319

PASAL 7 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA dalam Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara mengalami keterlambatan dalam penyelesaian Laporan Hasil Pelaksanaan tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi :

1. Denda sebesar 1 ‰ perhari dengan maksimum denda sebesar 5 % dari nilai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Tidak akan diikutsertakan dalam Pelaksanaan Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara berikutnya, atau bentuk kegiatan lainnya.
3. Apabila pelaksana program melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

PASAL 8

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat rangkap 7 (tujuh) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar pada : Penyelenggara Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi Unimed.
- 1 (satu) lembar pada : Penanggungjawab Pelaksanaan Penelitian Identifikasi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya di Tapanuli Bagian Selatan Propinsi Sumatera Utara
- 3 (tiga) lembar pada : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan.
- 1 (satu) lembar pada : Kantor Lembaga Penelitian Unimed.
- 1 (satu) lembar pada : Kantor SPI Unimed.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diperbuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
Ketua Pelaksana Penelitian,

Drs. THAMRIN, M.Si
NIP. 132047791

PIHAK PERTAMA :
Pejabat Pembuat Komitmen Penyelenggara
Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi,

Drs. WILDANSYAH LUBIS, M.Pd.
NIP. 131570408

Isu Strategis : Pengentasan Kemiskinan

LAPORAN PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL



**IDENTIFIKASI KEMISKINAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGANNYA DI TAPANULI BAGIAN SELATAN
(TABAGSEL) PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh :
Drs. Thamrin, M.Si
Dr. M. Yusuf, M.Si
OK Sofyan Hidayat, SE, M.Si, Ak

Dibiayai Oleh DIPA UNIMED T.A 2009
Dengan Surat Perjanjian Kerja untuk Penelitian Hibah Penelitian Strategis Nasional
Nomor : 0187.0/023-04.2/II/2009

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOPEMBER, 2009

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : IDENTIFIKASI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DI TAPANULI BAGIAN SELATAN (TABAGSEL) PROVINSI SUMATERA UTARA

2. Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Drs. Thamrin, M.Si
b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
c. NIP : 132047791
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural : Pembantu Dekan 1
f. Bidang Keahlian : Ilmu Ekonomi
g. Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Pendidikan Ekonomi
h. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Medan
i. Tim Peneliti :

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Dr. M. Yusuf, M.Si	Ekonomi Pembangunan	FE/ Pendidikan Ekonomi	UNIMED
2	OK Sofyan Hidayat, SE, Ak	Keuangan	FE/ Akuntansi	UNIMED

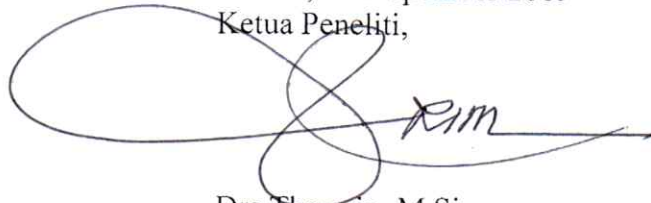
3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian
a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 6 bulan
b. Biaya total yang diusulkan : Rp 100.000.000,-

Surat perjanjian kerja nomor : 3899/H.33.17/SPMK/2009 tanggal 16 Juli 2009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Kustoro Budiarta, ME
NIP. 132005032

Medan, Nopember 2009
Ketua Peneliti,


Drs. Thamrin, M.Si
NIP. 132047791

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNIMED

Dr. Ridwan A. Sani, M.Si
NIP. 1317726614

RINGKASAN

IDENTIFIKASI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DI TAPANULI BAGIAN SELATAN (TABAGSEL) PROVINSI SUMATERA UTARA

Thamrin, Muhammad Yusuf dan OK.Sofyan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah kemiskinan masyarakat di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sebagai salah satu daerah yang mempunyai angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya di propinsi Sumatera Utara. Upaya identifikasi ini dapat digunakan sebagai dasar rasional dalam merancang dan mengimplementasikan strategi dan program-program perencanaan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan di Tabagsel.

Penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan (Maret sampai dengan Oktober) dengan mengambil sampel Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL). Identifikasi yang akan dilakukan akan diarahkan untuk menemukan model strategi pengentasan kemiskinan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah setempat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil angka kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif untuk mengidentifikasi gejala dan akar permasalahan kemiskinan. Selanjutnya dirumuskan model strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Tabagsel Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rata-rata kepala keluarga miskin tidak mempunyai aset lahan untuk usaha pertanian yaitu 238 KK (31,2 persen), tidak mempunyai kebun 217 KK (28,4 persen), tidak mempunyai tambak 758 KK (99,2 persen), dan tidak mempunyai tanah pekarangan sebanyak 691 KK (90,4 persen). Sebanyak 197 KK (25,8 persen) bekerja sebagai upahan (buruh tani, buruh bangunan, moco-moco). Umumnya kepala keluarga tidak mempunyai ternak untuk dijadikan objek pendapatan yaitu 761 KK tidak mempunyai sapi, 754 KK tidak mempunyai kerbau, 749 KK tidak mempunyai kambing dan 633 KK tidak mempunyai ternak ayam dan itik. Tingkat pendidikan masih sangat rendah dimana 248 KK (32,5 persen) tidak tamat SD, dan tamat SD 384 KK (50,3 persen), dan hanya 4 KK (0,5 persen) yang menamatkan diploma, serta tidak seorangpun diantara mereka yang menamatkan S1. Faktor internal yang terakhir secara umum (hasil essay RT) disimpulkan bahwa mereka tidak mau beralih ke sektor lain (tetap di sektor pertanian tradisional), pemerintah banyak memberi janji yang tidak terwujud, tidak terintegrasi (terpadu) dalam intervensi pemerintah tetapi secara parsial dari 49 mengungkapkan persoalan yang dihadapi, cepat puas, dan pesimis, serta etos kerja yang masih kurang, pupuk yang tidak tersedia

Faktor eksternal menunjukkan bahwa Jumlah dokter yang bertugas di Puskesmas masih kurang rata-rata hanya tersedia seorang dokter setiap puskesmas, 30 puskesmas tidak mempunyai dokter gigi, hanya ada 32 Puskesmas yang mempunyai bidan dari 56 puskesmas yang diteliti. Ketersediaan obat-obatan dan jarum suntik masih kurang cukup didapati pada 12 puskesmas dari 56 puskesmas yang diteliti. Selanjutnya kondisi bangunan SD umumnya baik, hanya yang rusak 5% dan rusak berat 0.5%, Rasio murid dengan guru

secara total telah baik yakni 1 orang guru berbanding dengan 28 murid. Namun rasio ini tidak menyebar secara merata di semua kecamatan, sehingga ada kecamatan seperti kecamatan di Paluta dan Palas rasionya adalah 1:40. Jumlah murid yang mendapat beasiswa cukup signifikan yakni 85 % dari dana BOS, baik SD maupun SLTP. Jumlah pendapatan sekolah dari dana BOS hampir merata diseluruh sekolah yang diteliti, namun masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan sekolah..

Observasi Komunitas yang dilakukan terdapat dari 5 Kabupaten/Kota yang diobservasi, 45,7 persen tidak mempunyai sekolah TK sebagai pengembangan bakat dan minat sejak dini dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebanyak 25,8 persen tidak mempunyai pasar, 23,3 persen tidak mempunyai koperasi, dan 24,5 persen dijumpai adanya Bank. Sebanyak 15,3 persen tidak mempunyai bus besar angkutan umum, dan 23,7 persen tidak ada becak.

PRAKATA

Pertama sekali puji dan syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dan penulisan laporan akhir ini dapat diselesaikan. Penelitian ini mengungkapkan tentang identifikasi kemiskinan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Tapanuli Bagian Selatan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti telah banyak melibatkan para responden dalam mengumpulkan data, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada masyarakat di Tapanuli Bagian Selatan yang telah bersedia menjadi responden. Demikian juga halnya Pemkab dan Pemko di Tabagsel yang telah banyak memberikan bantuan demi terselenggaranya penelitian ini. Semoga bantuan ini menjadi ibadah dan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada Pimpinan Unimed dan Lembaga Penelitian Unimed yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Nopember 2009,

Tim Peneliti

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1. Sumber daya perkebunan Tabagsel	24
Tabel .2. Luas rumah responden menurut klasifikasi luas rumah	31
Tabel. 3. Kondisi atap rumah responden	32
Tabel. 4. Kondisi dinding rumah responden	32
Tabel. 5. Kondisi lantai rumah responden	33
Tabel. 6. Sumber air minum rumah responden	33
Tabel. 7. Jenis penerangan rumah responden	34
Tabel. 8. Fasilitas Tbab menurut kepemilikan rumah responden	34
Tabel 9. Nilai pendidikan rumah responden	35
Tabel 10 Nilai transportasi rumah responden	35
Tabel 11 Nilai kesehatan rumah responden	36
Tabel 12 Nilai ikan asin menurut rumah responden	36
Tabel 13 Nilai daging rumah responden	37
Tabel 14 Nilai telur rumah responden	37
Tabel 15 Nilai sayur rumah responden	38
Tabel 16 Nilai minyak tanah rumah responden	38
Tabel 17 Nilai minyak goreng rumah responden	39
Tabel.18 Nilai beras rumah responden	39
Tabel.19 Nilai gula rumah responden	39
Tabel.20 Nilai ikan basah rumah responden	40
Tabel.21 Kualitas gedung Puskesmas	41
Tabel.22 Kondisi atap, lantai, dinding, perabotan, penerangan puskesmas	42
Tabel.23 Jumlah paramedis dan non paramedis puskesmas	42
Tabel 24 Jumlah provider dan pasien puskesmas	43
Tabel 25 Rata-rata jumlah hari dan jam pelayanan puskesmas	43
Tabel 26 Ketersediaan obat dan jarum suntik puskesmas	44
Tabel 27 Kecukupan peralatan dan obat emergency puskesmas	44
Tabel 28 Kualitas gedung sekolah dasar menurut kecamatan	45
Tabel 29 Kondisi atap,lantai,dinding,perabotan dan penerangan SD	46
Tabel 30 Jumlah guru, murid dan ruang kelas SD	46
Tabel 31 Jumlah guru yang disertifikasi dan siswa yang beasiswa	47
Tabel 32 Jumlah sampel desa/kelurahan menurut Kabupaten/kota	47
Tabel 33 Ketersediaan TK,SD dan SMP	48
Tabel 34 Ketersedian pasar, bank, koperasi dan rentenir	48
Tabel 35 Ketersediaan sarana angkutan umum	49
Tabel 36 Ketersediaan sarana informasi dan komunikasi	49
Tabel 37 Ketersediaan listrik dan air bersih	50
Tabel 38 Rata-rata penduduk kaya, menengah dan miskin	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka pemikiran	8
Gambar 2. Skema penanggulangan kemiskinan di Tabagsel	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka pemikiran	8
Gambar 2. Skema penanggulangan kemiskinan di Tabagsel	12

Banyak persyaratan yang diperlukan untuk keberhasilan program pengentasan kemiskinan karena persoalan kemiskinan merupakan masalah yang sangat pelik dan multidimensional. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari hasil pembangunan dan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan menuntut peninjauan sampai pada akar masalah. Sesungguhnya tidak ada jalan pintas untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Persoalannya tidak dapat dimunculkan di atas meja, dan penanggulangannya tidaklah mungkin dengan melahirkan program tiba-tiba. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk dilakukan jika pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan masyarakat Tabagsel. Penelitian ini dapat dijadikan identifikasi awal yang menjadi dasar dalam tahapan pengentasan kemiskinan selanjutnya. Manakala pemerintah tidak dapat membuat model strategi pengentasan kemiskinan dikhawatirkan kesejahteraan masyarakat akan terus terpuruk.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil identifikasi kemiskinan dan strategi penanggulangannya pada masyarakat Tabagsel yaitu meliputi :

- a) Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan
- b) Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara
- c) Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Selatan
- d) Masyarakat Kabupaten Madina
- e) Masyarakat Kota Padang Sidempuan

Untuk mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan pembatasan sampel berdasarkan tujuan (*Purposive sampling*) yaitu masyarakat yang miskin di daerah tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan tajam, lokasi penelitian merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Faktor yang penting dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi ini adalah dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi dan keterjangkauan daerah dan waktu penelitian. Namun demikian penetapan daerah diusahakan seoptimal mungkin dapat mewakili kondisi kemiskinan di daerah Tabagsel. Daerah tersebut antara lain:

- a) Kabupaten Tapanuli Selatan
- b) Kabupaten Padang Lawas Utara
- c) Kabupaten Padang Lawas Selatan
- d) Kabupaten Madina
- e) Kota Padang Sidempuan

D. Hasil Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) Untuk mengetahui karakteristik dan akar permasalahan kemiskinan masyarakat di Tabagsel
- 2) Untuk mengetahui struktur sosial-ekonomi masyarakat Tabagsel di dalam mengimplementasikan strategi dan program-program perencanaan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan di Tabagsel.
- 3) Untuk merumuskan model strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Tabagsel Propinsi Sumatera Utara sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil angka kemiskinan.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan identifikasi kemiskinan dan strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan yang lebih operasional dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik dan akar permasalahan kemiskinan masyarakat di Tabagsel
2. Untuk mengetahui struktur sosial-ekonomi masyarakat Tabagsel di dalam mengimplementasikan strategi dan program-program perencanaan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan di Tabagsel.
3. Untuk merumuskan model strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Tabagsel Propinsi Sumatera Utara sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil angka kemiskinan.

B. Manfaat Penelitian

Dengan teridentifikasinya kemiskinan di daerah Tabagsel dan strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan ini maka hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi :

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Tabagsel dalam mengambil kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan
- 2) Masyarakat miskin di daerah Tabagsel, yang mana dengan informasi yang ada dalam penelitian ini pengambil kebijakan diharapkan tidak salah sasaran dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan.

- 3) Perguruan tinggi, sebagai lembaga ilmiah yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian seputar permasalahan kemiskinan di Sumatera Utara..

Kesimpulan

Salah satu penyebab munculnya masyarakat miskin adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak.

Kemiskinan juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja yang tersedia dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada.

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara meningkatkan pajak yang dikenakan pada masyarakat yang mampu.

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara meningkatkan pajak yang dikenakan pada masyarakat yang mampu.

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara meningkatkan pajak yang dikenakan pada masyarakat yang mampu.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

Studi ini memulai dengan menguraikan berbagai persepsi mengenai kemiskinan. Menurut Watts (1968), definisi kemiskinan lebih dikaitkan pada kepemilikan sumberdaya, dibandingkan dengan konsumsi aktual terhadap beberapa barang yang spesifik.

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai sebuah situasi yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup (Drenowski, 1976). Konsep kemiskinan ini didefinisikan sangat umum. Konsep kemiskinan ini menimbulkan dua pertanyaan (1) kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dianggap memenuhi kriteria kemiskinan, (2) dan apa yang dimaksud dengan "secara cukup". Hal ini menimbulkan perdebatan yang panjang diantara para ahli.

Ada juga yang memberikan definisi kemiskinan dengan istilah kesejahteraan, bukan pada kepemilikan sumberdaya. Kemiskinan merupakan suatu situasi yang menunjukkan kesejahteraan, yang diturunkan dari kepemilikan sumberdaya sebuah rumah tangga dengan batasan tingkat kesejahteraan minimum tertentu (the poverty threshold, Hangnaars, 1998:10). Definisi ini yang mengarahkan pada diskusi mengenai garis kemiskinan.

Sen (1987) yang memenangkan hadiah Nobel di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1998 dengan mengajukan penggunaan standar hidup minimum untuk mengidentifikasi orang-orang miskin. Konsep kemiskinan ini juga mengalami perdebatan panjang di antara para ahli.

Menurut Sen, nilai standar terletak pada kepemilikan komoditi-komoditi (1987:25). Konsep ini secara dasar berfokus pada jenis-jenis kehidupan manusia,

apakah benar-benar berperan atau dapat berperan, dan ini merupakan "*basic needs*" yang diformulasikan ke dalam garis fungsi dan kapasitas.

Persepsi kemiskinan yang diungkapkan oleh Townsend (1985) dalam tulisannya De vos dan Hagenaars (1988) yaitu seseorang dikatakan dalam kemiskinan jika ia kurang memiliki sumberdaya untuk menikmati makanan, aktivitas sosial, dan kondisi kehidupannya dari kenikmatan yang wajar.

Studi ini juga memerlukan pemahaman mengenai sifat-sifat orang miskin itu sendiri. Chambers (1991) mengatakan bahwa orang-orang miskin tidak dapat dilihat dan diketahui oleh peneliti atau staf lokal. Hal ini dikarenakan oleh orang-orang miskin tidak akan mendatangi pertemuan-pertemuan dan meninggalkan lokasi terpencil (daerah yang dianggap tidak layak hidup). Dan terdapat pula hal-hal "*invisible dimensions*", seperti hubungan social (patron-client, indebtedness, webs obligation, and exploitation), (Chambers, 1981:5).

Chambers juga mengungkapkan persepsi masyarakat (*outsiders*) mengenai orang-orang miskin yaitu boros, malas, fatalistis, dungu, bodoh, dan menyenangi kemiskinan. Ternyata persepsi tersebut salah. Berdasarkan studi kasus menunjukkan bahwa orang-orang desa miskin memperlihatkan sikap tegar, bekerja keras, berbakat, ulet, dan tabah. Mereka harus menjadi seorang pejuang.

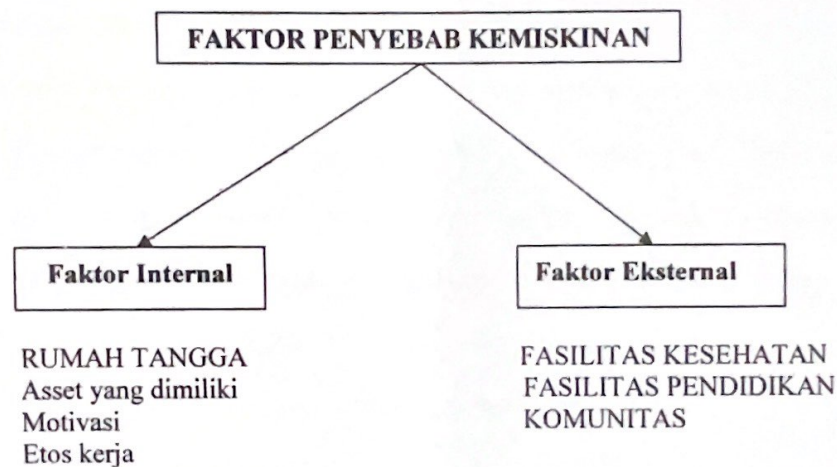
B. Strategi Pengentasan Kemiskinan.

Banyak strategi (program) anti kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh institusi internasional atau pemerintah. Beberapa di antaranya seperti:

- a. Bantuan pangan (*Food-For-Work/FFW*)
- b. Jaminan pekerjaan (*Employment Quarantee Scheme/EGS*)
- c. Subsidi dan penjatahan pangan (*Food ration and subsidy scheme*)
- d. Dana social (*Social Fund*)

- e. Program nutrisi (*Nutrition Programme : no meal scheme*)
- f. Program pengembangan pedesaan secara terpadu (*intergrated Rural Development programme*)
- g. Bantuan kredit (*Credit Support Scheme*)
- h. Inpres desa tertinggal (IDT di indonesia)
- i. Program pemberdayaan publik dan privat (*the massive programme for creating public and private employment*)
- j. Subsidi input pertanian (*Agricultural input subsidies*)
- k. Bantuan pencari pekerjaan (*Job seach assistance*)

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



C. Studi yang telah dilakukan

Penelitian yang telah dilakukan Thamrin dkk tentang identifikasi dan strategi penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangannya di Pemkab Asahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini banyak yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan (salah sasaran).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dkk, tentang kemiskinan di Kabupaten Dairi. Penelitian ini mengungkapkan tentang kurang efektifnya program pengentasan kemiskinan selama ini karena banyak yang tidak cocok sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi yang meliputi: (1) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi yang meliputi: (a) Kabupaten Dairi, (b) Kecamatan Dairi, (c) Desa Dairi, (d) Kelurahan Dairi, (e) Kecamatan Dairi, (f) Desa Dairi, (g) Kelurahan Dairi, (h) Kecamatan Dairi, (i) Desa Dairi, (j) Kelurahan Dairi.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi, (2) jumlah penduduk miskin di Kecamatan Dairi, (3) jumlah penduduk miskin di Desa Dairi, (4) jumlah penduduk miskin di Kelurahan Dairi.

3.1.1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.

1. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih. Untuk pengumpulan data wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk pengumpulan data wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

- a. Pengumpulan data wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.
- b. Pengumpulan data wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.
- c. Pengumpulan data wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.

2. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.

3. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.

4. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.

5. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan yang dipilih.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tabagsel Provinsi Sumatera Utara, yang melibatkan masyarakat miskin di Tabagsel yang terbagi pada lima Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Madina dan Kota Padang Sidempuan.

Jangka waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2009.

B. Metode Pengumpulan Data

Proses identifikasi kemiskinan dan strategi penangulangannya di Tabagsel secara garis besar dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menghimpun serta menganalisis fakta dan data yang penting dan relevan tentang sifat kemiskinan dan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga yang mencakup asset (*esensial assets*), modal kerja (*working capital*), pendapatan dan sumberdaya rumah tangga lainnya. Untuk maksud tersebut akan dilakukan :
 - a. Pengumpulan data primer yang diperoleh melalui kuesioner
 - b. Pengumpulan data skunder baik kuantitatif maupun kualitatif.
 - c. Observasi langsung kelapangan
2. Melaksanakan kajian tentang berbagai metode dan model tentang penetapan program dan strategi penanggulangan kemiskinan.
3. Model pengentasan kemiskinan
4. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, dan analisis SWOT
5. Penyajian dan pembahasan berdasarkan studi lapangan akan dilakukan melalui seminar untuk mendapatkan masukan-masukan khususnya dari pemerintah daerah, institusi dan masyarakat Tabagsel.

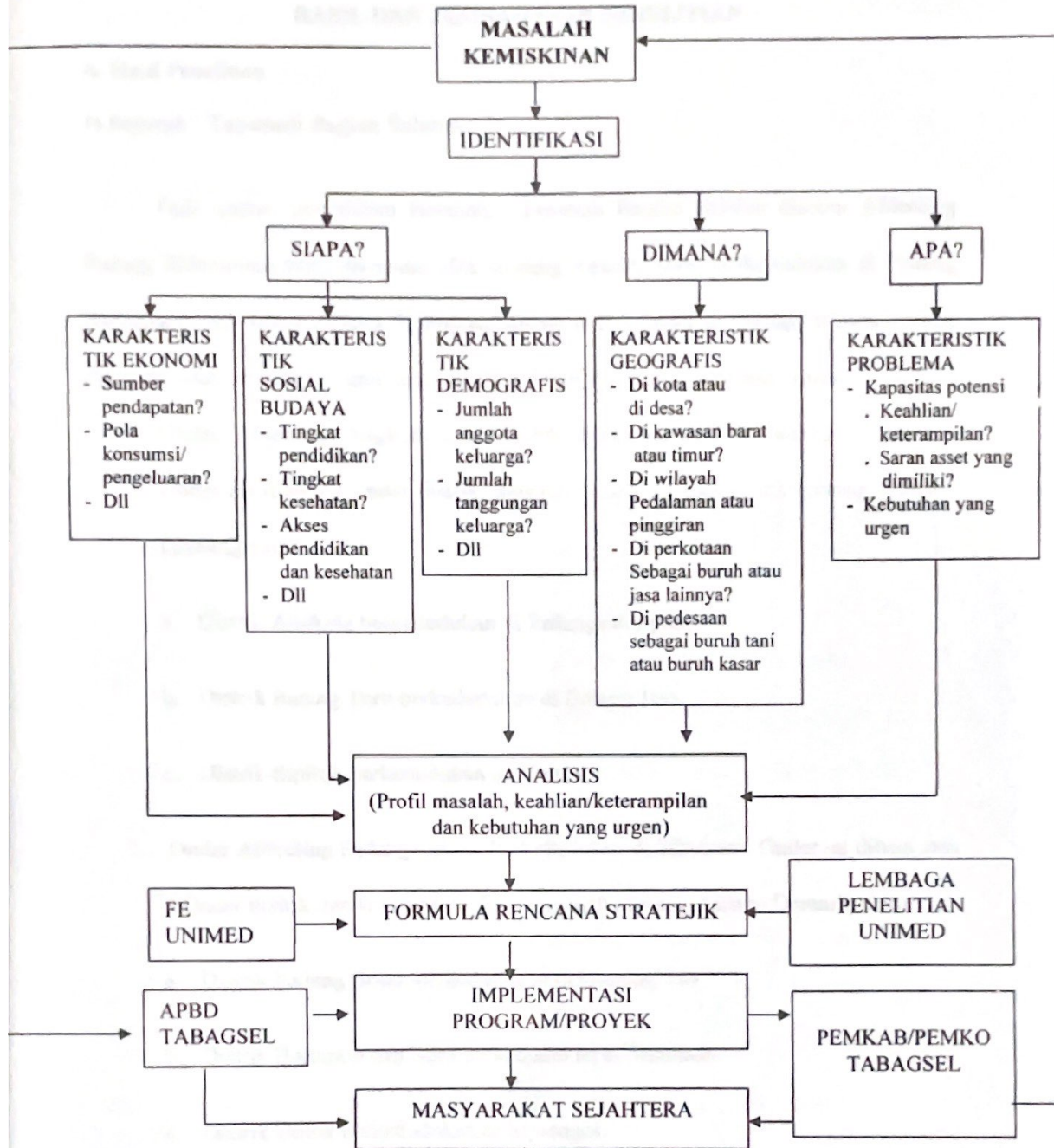
Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah mengenai proses identifikasi kemiskinan dan penaggulangannya, dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di Tabagsel yang terdiri dari faktor internal (rumah tangga yang meliputi aset yang dimiliki, motivasi, dan etos kerja) dan faktor eksternal (fasilitas kesehatan, pendidikan dan komonitas). Setelah mengetahui faktor internal dan eksternal maka diformulasikan strategi penaggulangannya. Alur pikir ini dapat dilihat pada gambar 2.

Strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan melalui perencanaan terpadu dan komprehensif yang berhubungan dengan usaha-usaha di dalam menentukan kebijakan-kebijakan, program-program, dan tindakan-tindakan dengan pertimbangan ketersediaan sumberdaya.

Strategi terpadu dan komprehensif tersebut terdiri dari strategi jangka pendek (*micro-level strategies*) yang digunakan untuk mengeliminasi kemiskinan dan strategi jangka panjang (*macro-level programs policies*) yang dapat terlaksana dengan partisipasi secara komprehensif dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu lingkup kegiatan dari studi ini pada umumnya adalah :

1. Mengadakan pengumpulan data yang berkaitan dengan identifikasi karakteristik kemiskinan di Tabagsel
2. Mengadakan pengumpulan data terhadap potensi dan prospek pembangunan ekonomi di Tabagsel
3. Mengadakan studi literatur yang ada mengenai pembangunan program dan strategi perencanaan pembangunan Tabagsel
4. Mengadakan evaluasi terhadap data yang ada, yaitu menyangkut dengan karakteristik kemiskinan dan konsep dan strategi penaggulangan kemiskinan di Tabagsel.

Gambar 2
Skema Penanggulangan Kemiskinan di Tabagsel



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1) Sejarah Tapanuli Bagian Selatan

Pada zaman penjajahan Belanda, Tapanuli Bagian Selatan disebut Afdeeling Padang Sidempuan yang dikepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Afdeeling Padang Sidempuan dibagi atas 3 onder afdeeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu :

1. Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padang Sidempuan. Onder ini dibagi 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisiten Demang yaitu :
 - a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidempuan
 - b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru
 - c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok
2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 Onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang yaitu :
 - a. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua
 - b. Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan
 - c. Distrik Dolok berkedudukan di Sipiongot
3. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini di bagi atas 4 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisiten Demang yaitu :

- a. Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan
- b. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan
- c. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi
- d. Distrik Natal berkedudukan di Natal

Tiap-tiap onder distrik di bagi atas beberapa luhut yang dikepalai oleh seorang kepala Luhut (Kepala Kuria) dan tiap-tiap luhut dibagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

Daerah Angkola Sipirok di bentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidimpuan .Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbang.

Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu Kabupaten di kepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjung Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution. Sesudah tentara Belanda memasuki Kota Padangsidimpuan dan Gunung Tua daerah administrasi Pemerintah masih tetap sebagaimana biasa, hanya Kantor Buapati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.

Setelah RI menerima kedaulatan pada ahir tahun 1949, maka daerah pembangunan administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang pada kantor Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidimpuan.

Pada priode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan penambahan Kecamatan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Batang angkola berasal dari sebageian Kecamatan Padngsidimpuan dengan ibu negerinya Pintu Padang.
2. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan Ngerinya Siabu.
3. Kecamatan Sipirok Dolok Hole berasal dari sebageian Kecamatan Sipirok dengan Ibu Negeri Sipagimbar.
4. Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan Ibu Negerinya Pasar Ujung Batu.
5. Kecamatan Sosopan berasal dari sebageian Kecamatan Barumun dan Sosa dengan Ibu Negrinya Sosopan.
6. Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebuah Kecamatan Padang Bolak dengan Ibu Negerinya Binanga.

Sejak tanggal 30 November 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Padangsidimpuan Barat, Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan dimana kecamatan Padangsisimpuan Utara dan Padagsisimpuan Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan (PP Nomor 32 Tahun 1982).

Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan .

1. Kecamatan Natal dengan Ibu Kotanya Natal.
2. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan Ibu Kotanya Singkuang.

3. Kecamatan Batahan dengan Ibu Kotanya Batahan.

Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan Ibu Kotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidempuan Barat. Kemudian apada tahun 1996 sesuai dengan PP.RI No.1 Tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan Ibu Kotanya Hutaimbaru, yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak.

Dengan keluarnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disyahkan pada tanggal 23 November 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibu kotanya Panyabungan) dengan jumlah daerah administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibu kotanya Padangsidempuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan .

Selanjutnya tahun 1999 sesuai dengan PP.RI No.43 tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

1. Kecamatan Sosopan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan dengan ibu kotanya Sosopan dan Kecamatan Onang dengan ibukotanya Pasar Matanggor.
2. Kecamatan Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu kecamatan Padang Bolak dengan ibu kotanya Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu dengan ibu kotanya Batu Gana.
3. Kecamatan Sipirok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sipirok dengan ibu kotanya Sipirok dan Kecamatan Arse dengan ibu kotanya Arse.

4. Kecamatan Dolok dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolok dengan ibu kotanya Sipiongot dan Kecamatan Dolok Sigompulan dengan ibu kotanya Pasar Simundol.

Pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 terbentuklah Kota Padangsidempuan yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan Selatan, Padangsidempuan Tenggara, Padangsidempuan Batunadua, Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Padangsidempuan Angkola Julu.

Pada tahun 2002 sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2002, tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristik. Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut diatas berasal dari :

1. Kecamatan Sayur Matinggi dengan ibukotanya Sayurmatinggi berasal dari sebagian Kecamatan Angkola
2. Kecamatan Marancar dengan ibu kotanya Marancar berasal dari sebagian Kecamatan Batang Toru.
3. Kecamatan Aek Bilah dengan ibu kotanya Biru berasal dari sebagian Kecamatan Saipar Dolok Hole.
4. Kecamatan Ulu Barumon dengan ibu kotanya Pasar Paringgonan berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.
5. Kecamatan Lubuk Barumon dengan ibu kotanya Pasar Latong berasal dari sebagian Kecamatan Barumon.

6. Kecamatan Portibi dengan ibu kotanya Portibi berasal dari sebagian kecamatan Padang Bolak.
7. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan ibu kotanya Huta Raja Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
8. Kecamatan BAtang Lubu Sutam dengan ibu kotanya Pinarik berasal dari sebagian kecamatan Sosa.
9. Kecamatan Simangambat dengan ibu kotanya Langkimat berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.
10. Kecamatan Huristak dengan ibu kotanya Huristak berasal dari sebagian Kecamatan Barumon Tengah.

Selanjutnya pada tahun 2007 Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan kembali menjadi dua Kabupaten baru yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Padang Lawas (Palas). Dengan demikian Tapanuli Bagian Selatan menjadi 4 Kabupaten 1 Kota yang terdiri dari 56 kecamatan dan 1643 desa/kelurahan.

2) Letak Geografis

Tapanuli Bagian Selatan terletak antara $0^{\circ} 10^1$ sampai dengan $1^{\circ} 50^1$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 50^1$ sampai dengan $100^{\circ} 10^1$ Bujur Timur, dengan ketinggian 0 – 1915 m di atas permukaan laut. Tapanuli Selatan merupakan daerah paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Labuhan Batu (Provinsi Sumatera Utara).
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Riau

- Sebelah Barat : Samudera Indonesia.

Keadaan tofografis terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit dan bergunung. Daerah ini dikelilingi oleh gunung Sorik Merapi Kecamatan Kotanopan, gunung gonggongan di Kecamatan Batang Angkola, gunung Lubuk Raya di Kecamatan Padangsidempuan Barat, dan gunung Sibualbuali di Kecamatan Sipirok.

Selain memiliki gunung-gunung yang indah, Tapanuli Selatan juga memiliki panorama yang indah akan danaunya seperti danau Siombun di Kecamatan Panyabungan, danau Tao di Kecamatan Sosopan, danau Siais di Kecamatan Siais dan danau Marsabut di Kecamatan Sipirok.

Kecamatan Tapanuli Selatan juga dialiri oleh 486 buah sungai, baik besar maupun kecil. Bahkan aliran sungai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, industri maupun irigasi, diantaranya sungai Batang Gadis, Sungai Barumon, Sungai Batang Pane dan lain-lain.

Pulau pulau kecil di Kecamatan Natal memperlengkap kekayaan sumber daya alam di daerah ini, diantaranya pulau Tamang, pulau Ilik, Pulau Sadokah, Pulau Tengah dan lain-lain yang berjumlah 12 pulau. Hutan hutan lebat dan alami yang tersebar ini juga menambah sejuk alamnya. Penduduk Tapanuli Selatan berjumlah 1.224.827 jiwa dengan kepadatan penduduk 65 jiwa/km. Luas wilayahnya 18.896, 50 km. Penduduk yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya terdiri atas suku Batak Mandailing, Batang Angkola, Batak Toba, Minang, Nias, Sunda dan Jawa.

3) Sosial Budaya dan Keagamaan

Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan merupakan masyarakat religi yang berdampingan dengan adat budaya. Tapanuli Selatan terkenal dengan gudang ulama yang merupakan lulusan dari sejumlah pesantren. Oleh karena itu pembangunan ekonomi Tapanuli Selatan harus melalui pendekatan sosial keagamaan. Pendekatan *socio-religio*

adalah pendekatan yang tepat di mana para pemimpin birokrat dan ulama bekerja sama untuk mensosialisasikan secara terus menerus kepada masyarakat maka pembangunan di Tapanuli Bagian Selatan akan cepat berkembang menuju masyarakat yang sejahtera.

Persuasi yang terus menerus dilakukan oleh para komunikator itu, niscaya akan mengurangi keinginan untuk melakukan kritik – kritik yang tidak membangun. Berangkat dari pemikiran ini, maka mesjid harus difungsikan sebagai salah satu pusat kemajuan di pedesaan.

Berbagai hasil penelitian menyebutkan, bahwa prioritas utama pembangunan fisik yang dikehendaki masyarakat adalah pembangunan rumah ibadah. Pengalaman para perantau membenarkan hasil penelitian ini, bahwa terbukti kebanyakan para perantau mengambil bagian dalam pembangunan atau renovasi rumah ibadah di kampungnya. Kurang difungsikannya dan kurang dihargainya lembaga – lembaga keagamaan dalam proses pembangunan di pedesaan, telah melemahkan semangat partisipasi masyarakat. Ini merupakan indikasi pendekatan agama lebih berfungsi dibandingkan dengan pendekatan lain.

Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai – nilai budaya dan keagamaan. Perlu diterapkan implementasi nilai – nilai luhur yang terkandung dalam filosofi *horja* dalam pelaksanaan pembangunan.

Habisukan, wisdom, kearifan, niscaya diperlukan dalam merancang dan melaksanakan *horja pembangunan* Tapanuli Bagian Selatan yang merupakan kerjasama antara birokrat, ulama dan pengetua adat.

4) Pendidikan Dan Kesehatan

Tapanuli Bagian Selatan mempunyai sekolah dasar sejumlah 7.548 unit terdiri dari 7.171 negeri dan 378 swasta dengan jumlah murid seluruhnya 130.939 orang dan guru berjumlah 3.539 orang. Dengan kata lain rasio guru dengan murid tahun 2008 adalah 1 : 37.

Rasio ini masih tergolong menengah, namun dapat diperkecil lagi di masa mendatang menjadi 1 : 20-25 tentunya dengan penambahan guru. Sementara itu, jumlah SLTP ada 1.820 unit, 122 unit diantaranya adalah swasta, dengan jumlah murid seluruhnya 75.814 orang dan jumlah guru 3.112 orang. Jumlah SLTA Umum di kabupaten ini ada sejumlah 1.386 unit, 75 diantaranya swasta, dengan jumlah murid seluruhnya 55.440 orang dan jumlah guru 2772 orang (1 : 20). Jumlah SLTA Kejuruan berjumlah 86 unit, 16 unit diantaranya swasta dengan jumlah murid seluruhnya 14.163 * orang dan jumlah guru 675 orang (1 : 21). Di daerah ini terdapat 8 universitas/ perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa sebesar 8440 orang dan jumlah dosen 172 orang.

Jumlah siswa penerima beasiswa seluruhnya berjumlah 4.844 siswa SD (3,7 persen dari total murid SD), 3.791 siswa SLTP (5,1 persen), 3.492 siswa SLTA (6,3 persen). Jumlah penerima beasiswa diharapkan bertambah di masa mendatang sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan di daerah ini. Sementara itu, jumlah sekolah menerima Dana Bantuan Operasional (DBO) adalah 6.038 SD (80,0 persen), 2415 SLTP (77,6 persen), dan 945 SLTA (68,2 persen). Jumlah sekolah penerima DBO inipun diharapkan bertambah di masa mendatang (dapat dipenuhi 100 persen) sehingga program penanggulangan kemiskinan dari sudut eksternal dapat terwujud.

Fasilitas kesehatan di Tapanuli Bagian Selatan dapat dijumpai 6 buah rumah sakit, 40 puskesmas, 233 puskesmas pembantu, 43 tempat praktek dokter, 192 tempat praktek bidan, 49 toko obat berizin dan 480 posyandu, serta 26 apotik. Banyaknya tenaga medis di daerah ini, 261 orang dokter, 339 orang bidan, dan 559 orang perawat. Tenaga kesehatan ini sangat dipentingkan dalam program penanggulangan kemiskinan dari sudut eksternal, karena umumnya orang-orang yang sering sakit-sakitan tidak akan dapat meningkatkan

produktivitasnya, oleh sebab itu diperlukan kesiapan fasilitas kesehatan baik prasarana dan sarana gedung maupun petugasnya (kuantitas dan kualitas *provider*).

(1) Pertanian

Sektor pertanian di Tapanuli Bagian Selatan didominasi oleh sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perkebunan, di mana luas total sub sektor pertanian tanaman pangan pada wilayah ini mencapai 76.500 hektare, yang terdiri atas: Tapanuli Selatan seluas 18.000 hektare, Kota Padangsidempuan seluas 4.500 hektare, Palas seluas 19.000 hektare, Madina seluas 20.000 hektare dan Paluta seluas 11.000 hektare. Sementara untuk sub sektor perkebunan mencapai 600.000 hektare, padahal potensinya masih tersedia areal seluas 400.000 hektare, yang terdiri dari perkebunan besar sebesar 440.000 hektare dan perkebunan rakyat sebesar 160.000 hektare. Distribusi perkebunan rakyat yang ada saat ini adalah: Tapanuli Selatan seluas 16.700 hektare, Palas seluas 40.000 hektare, Madina seluas 50.000 hektare dan Paluta seluas 53.300 hektare. Dan distribusi untuk perkebunan besar adalah: Tapanuli Selatan seluas 126.000 hektare, Palas seluas 110.000 hektare, Madina seluas 120.000 hektare dan Paluta seluas 84.000 hektare.

Sub-sektor peternakan didominasi oleh ternak besar berupa lembu dan kerbau, terutama di daerah-daerah yang memiliki areal padang rerumputan yang luas, seperti: Paluta dan Palas. Pola peternakan besar yang berlangsung merupakan peternakan tradisional yang hanya mengandalkan pada pengembalaan di areal padang rumput. Total ternak besar yang ada di wilayah yang ini mencapai 33.000 ekor dan total ternak unggas mencapai 1.500.000 ekor/ tahun.

Berdasarkan SK No. 44/ Tahun 2006 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara, saat ini di wilayah ini terdapat 338.578 hektare berstatus hutan produksi (HP), yang distribusinya adalah Madina seluas 14.940 hektare, Palas seluas 171.925

hektare, Paluta seluas 65.417 hektare, dan Tapsel seluas 86.296 hektare, dan 329.220 hektare berstatus hutan produksi terbatas (HPT), yang distribusinya adalah Madina seluas 158860 hektare, Palas seluas 41.099 hektare, Paluta seluas 46.289 hektare, dan Tapsel seluas 82.972 hektare. Di kawasan hutan ini, terdapat beberapa izin perusahaan, yakni 5 perusahaan pemegang izin usaha perusahaan hutan (PT. Teluk Nauli, PT. Mum, Sibolga Timber, PT. Panai Lika Sejahtera, PT. Oruti dan PT. Keongnam) dan 4 perusahaan pemegang izin usaha perusahaan hutan tanaman industri (PT. Toba Pulp Lestari, PT. Hutan Barumon Perkasa, PT. Sumatera Riang Lestar, PT. Sejahtera Silva Lestari).

Sub Sektor Pertanian

- a. Potensi kelautan terdapat pada 3 kecamatan yaitu: Kec. Natal, Kec. Muara Batang Gadis, Kec. Batahan.
- b. Panjang pantai Kab. Mandailing Natal 170 km, luas wilayah penangkapan ikan mencapai 1.088 km²
- c. Terdapat 9 pulau kecil dan 4 diantaranya berpenghuni
- d. Produksi ikan hasil tangkapan nelayan 14.245 ton/tahun atau sebesar 5,39% dari potensi yang ada

Sub Sektor Perkebunan

Tabel .1

Sumber Daya Perkebunan Tapanuli Bagian Selatan

No.	Jenis Tanaman	LUAS (HA)	PRODUKSI (TON)
1	Karet	70355	172.671
2	Kakao	3.891	2.309
3	Kelapa Sawit	13.526	172.670
5	Kelapa	2.583	1.185
6	Kulit Manis	2.613	1.972
7	Aren	583	586
8	Kemiri	682	275
9	Kopi Arabika	686	315
10	Kopi Robusta	2.705	1018

SUMBER : DATA DIOLAH

(2) Sektor Pertambangan

Di wilayah Tapanuli Bagian Selatan terdapat cukup banyak potensi pertambangan, baik barang tambang yang masuk dalam kategori Strategis, Golongan A, Golongan B dan Golongan C. Barang tambang strategis yang teridentifikasi ditemukan di wilayah ini adalah minyak bumi dan uranium di Palas dan Paluta, yang hingga saat ini belum dieksplorasi dan dieksploitasi. Untuk barang tambang golongan A yang terdapat wilayah ini adalah emas, yang potensinya terdapat di wilayah Aek Kapur dan Aek Gambir di Tapanuli Selatan, Batahan di Madina, Pinarik, Palas; dan Batubara di Paluta dan Palas. Hingga saat ini terdapat dua perusahaan besar yang beroperasi di wilayah ini, yakni: PT. Sorik Mas Maining di Madina yang sedang dalam tahap eksploitasi dan PT. Agincourt Resources di Tapbagsel dengan potensi kandungan emas sebesar 250,000 oz emas dan 2 Moz perak per tahun dengan waktu produksi setidaknya selama 9 tahun. Sementara potensi emas yang ada di Paluta dan Palas, hingga saat ini belum dilakukan eksploitasi. Berdasarkan hasil penelitian dari PPTM Bandung, potensi batubara yang ada di wilayah ini memiliki kadar yang sangat tinggi sebesar 7.909 kalori dengan sulfur 0.1%. Potensi

timah ditemukan di beberapa lokasi, diantaranya: Kec. Siabu, Madina, Kec. Sayur Matinggi, Tapsel dan Kec. Sosopan, Palas. Potensi pengembangan energi yang ada di wilayah ini adalah: Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi di Sipi A dan Kota Nopan dan Pembangkit Tenaga Listrik Air di Sungai Batang Toru, Bantahan, dan Batang Toru.

(3). Sektor Potensi Pariwisata

Wilayah objek pariwisata di Tapanuli Bagian Selatan umumnya belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian besar baru dalam bentuk temuan.

Nama Objek Wisata

Lokasi

Air Panas Sibanggor	: Kec. Tambangan
Air Panas Sampuraga	: Kec. Panyabungan Barat
Air Panas Siabu	: Kec. Siabu
Danau Siombun	: Kec. Panyabungan
Danau Marambe	: Kec. Panyabungan Barat
Bendungan Batang Gadis	: Kec. Panyabungan
Air Panas Putusan	: Kec. Batang Natal
Air Terjun Sitaut	: Kec. Kotanopan
Panorama Sopotinjak	: Kec. Batang Natal
Sumur Multatuli	: Kec. Natal
Pantai Natal	: Kec. Natal
Pantai Sikara-Kara	: Kec. Natal
Kawah Gunung Sorik Marapi (Taman Nasional Btg. Gadis)	: Kec. Puncak Sorik Marapi

Catatan :

1. Saat Ini Sedang Dilakukan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan

Laut Teluk Ilalang Di Kecamatan Batahan Dengan Kedalaman 7 M Lws. Kemudian Diharapkan Untuk Pelabuhan Multipurpose Baik Untuk Pengangkut Cpo, Bahan Tambang, Bbm, Pupuk Dan Penumpang.

2. Pembangunan Bandar Udara Di Kec. Bukit Malintang Saat Ini Sudah Dilakukan Study Kelayakan Dan Telah Dipresentasikan Di Dep. Perhubungan RI Dan Tinggal Menunggu Persetujuan Penetapan Lokasi Oleh Dep. Perhubungan RI Dan Diharapkan Untuk Jangka Pendek Dapat Didarati Pesawat Jenis Hercules, Terutama Untuk Mengantisipasi Evakuasi Korban Bencana Karena Sebagian Besar Daerah Madina Termasuk Daerah Rawan Bencana Dan Jalan Akses Menuju Bandara Telah Selesai Dibangun Sepanjang 900 m Dengan Sumber Dana APBN Dari Dep. Pu.
3. Kab. Madina Memiliki Kawasan Taman Nasional Batang Gadis Seluas 108.000 ha Sebagai Penopang Paru-Paru Dunia.

4). Indikator-Indikator Pembangunan

1. *Jumlah Penduduk* 1.224.827 jiwa

1.224.827

2. *Kepadatan Pemduduk* : $\frac{1.224.827}{18.899} = 64.81$ Jiwa/Km.

3. *PDRB Perkapita* : $\frac{5.030,65}{1.190.0357} = \text{Rp. } 4.226.169, 12$

4. *Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008* : $\frac{5.86 + 3.38 + 4.91}{3} = 4.72\%$

5. *Rasio Bank dan Non Bank per 10.000 penduduk*

Rata-rata 5 Kabupaten/kota : $\frac{102}{1.190.351} \times 10.000 = 0,86$ atau 86%

6. *Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk*

Rata-rata 5 Kabupaten/Kota : $\frac{86}{1.190.351} \times 10.000 = 0,72$ atau 72%

7. Rasio Pasar per 10.000 penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kabupaten/kota : } \frac{105}{1.190.351} \times 10.000 = 0,88 \text{ atau } 88\%$$

8. Rasio Murid SD per usia SD, Ruang Kelas per 35 siswa

$$\text{Rata-rata 5 Kab/Kota : } \frac{7.548}{130.939} \times 35 = 2,02 \text{ atau } 202\%$$

9. Rasio SLTP per usia SLTP dengan Pembanding 35 per Kelas

$$\text{Rata-rata 5 Kab/Kota : } \frac{8.568}{35.814} \times 35 = 0,84 \text{ atau } 84\%$$

10. Rasio SLTA per usia SLTA, Pembanding Ruang Kelas per 35 siswa

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } \frac{1.386}{55.440} \times 35 = 0,88 \text{ atau } 88\%$$

11. Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } \frac{306 \times 10.000}{1.224.827} \times 100\% = 2,50 \text{ atau } 250\%$$

12. Rasio Tenaga Medis per 10.000 penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } \frac{161 \times 10.000}{1.224.827} \times 100\% = 130\%$$

13. Persentase Rumah Tangga yang mempunyai Kendaraan

$$\text{Rata-rata 5 Kab./kota : } \frac{228.540}{293.193} \times 100\% = 78\%$$

14. Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga

$$\text{Rata-rata 5 Kab./kota : } \frac{168.641}{293.193} \times 100\% = 58\%$$

15. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan

$$\text{Rata-rata 5 Kab./kota} : \frac{5.795.156}{228.540} = 25,34$$

16. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap usia 18 tahun ke atas.

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota} : \frac{206.630}{528.939} \times 100\% = 39\%$$

17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-I terhadap usia 25 tahun ke atas

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota} : \frac{22.399}{587.897} \times 100\% = 3,81\%$$

18. Rasio PNS terhadap penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota} : \frac{17.352}{1.224.827} = 0,0142 \text{ atau } 1,4\%$$

19. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota} : \frac{198,03}{418,42} = 0,47 \text{ atau } 47\%$$

20. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota} : \frac{198,03}{1.224.827} = \text{Rp } 161.679,98$$

21. Rasio PDS terhadap PDRB

$$\text{Rata-rata 5 Kab./kota} : \frac{198,03}{5.030,65} = 0,0395$$

22. Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota} : \frac{4.957}{1.224.827} \times 10.000 = 40,47$$

23. Rasio Fasilitas Lapangan Olah Raga per 10.000 penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota: } \frac{106}{1.224.827} \times 10.000 = 0,87 \text{ atau } 87\%$$

24. Jumlah Balai Pertemuan per 10.000 penduduk

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } \frac{98}{1.224.827} \times 10000 = 0,80 \text{ atau } 80\%$$

25. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu Legislatif per penduduk yang mempunyai Hak Pilih)

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } \frac{607.440}{820.865} = 0,74$$

26. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } \frac{63}{87} \times 100\% = 72\%$$

27. Luas Wilayah Keseluruhan

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } 18.899 + 32.072 = 50.791 \text{ km}^2$$

28. Luas Wilayah Efektif

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } 16.064 \text{ km}^2 \text{ atau}$$

$$\frac{16.064}{28.581} \times 100\% = 56\%$$

29. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } \frac{567}{18.899} = 0,030$$

30. Rasio Jumlah Personil Keamanan terhadap Jumlah Penduduk per 10.000

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota: } \frac{272}{1.190.357} \times 10.000 = 2,29$$

31. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

$$\text{Rata-rata 5 Kab./Kota : } 71,43 \times 100\% = 71,43 \%$$

5). Jumlah Keluarga Miskin

Menurut hasil pendataan BKKBN Tapanuli Bagian Selatan tahun 2008, jumlah kepala keluarga tergolong miskin di kabupaten ini adalah 109.929 KK dan tergolong sangat miskin adalah 27.633 KK. (menurut ukuran keluarga pra sejahtera). Dari jumlah tersebut hampir merata diseluruh kabupaten/kota se Tabagsel.

Alasan atau faktor penyebab mereka miskin menurut hasil pendataan tersebut umumnya adalah alasan ekonomi (95,85 persen), dan sisanya beralasan lainnya (non ekonomi). Alasan ekonomi dan non ekonomi ini dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yakni faktor dari luar si miskin atau disebut faktor eksternal dan faktor penyebab dari diri si miskin itu sendiri atau disebut faktor internal. Faktor eksternal antara lain penyediaan pupuk, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, komunitas desa (jalan, listrik, air, dan sebagainya). Sementara faktor internal antara lain asset yang dimiliki, etos kerja, motivasi/inisiatif, dan sebagainya.

Akhirnya, dari sekilas gambaran umum Tapanuli Bagian Selatan yang telah dipaparkan di atas, kiranya dapat dijadikan suatu ukuran keberhasilan program penanggulangan kemiskinan oleh pejabat pemerintah dan masyarakat.

Hasil survey lapangan di lima (5) di Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan memperlihatkan bahwa luas rumah responden yang terdata terbesar persentasenya adalah antara 16 -30 m² , yaitu 71,8 persen atau 686 rumah tangga dari 956 rumah tangga yang disurvei. Luas rumah antara 6 - 15 m² berjumlah 112 rumahtangga dari 956 rumah tangga yang disurvei, dengan persentase 11,8 persen. Antara 31 - 45 m berjumlah 76 rumah tangga dari 956 rumah tangga yang disurvei, dengan persentase 8 peren. Sedangkan luas rumah antara 0 - 5 m² dengan persentase 2,9 persen atau 27 rumah tangga dari 956 rumah tangga yang disurvei. Angka ini diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel. 2
Luas Rumah Responden Menurut Klasifikasi
Luas Rumah di TABAGSEL

Luas Rumah (M ²)	Frequency	Percent
0-5	27	2,9
6-15	112	11,8
16-30	686	71,8
31-45	76	8,0
46-60	43	4,5
61-140	10	1,05
Total	954	99,8
Missing System	2	0,2
Total	956	100

Tabel 3 memperlihatkan kondisi atap rumah responden yang dilakukan survey. Rumah tangga yang memiliki kondisi atap yang baik sebanyak 31 (3,24%) rumah tangga dari 956 rumah tangga yang disurvei. Kondisi atap yang rusak adalah 920 (96,23 %) rumah tangga, dan rusak berat sebanyak 5 (0,52%) rumah tangga. Keadaan ini digambarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Kondisi Atap Rumah Responden Menurut
Klasifikasi Kondisi di TABAGSEL

Kondisi Atap	Frequency	Percent
Baik	31	3,24
Rusak	920	96,23
Rusak Berat	5	0,52
Lainnya	-	-
Total	956	100,0

Tabel 4 memperlihatkan kondisi dinding rumah responden yang dilakukan survey. Rumah tangga yang memiliki kondisi dinding yang baik sebanyak 760 (79,50%) rumah tangga dari 956 rumah tangga yang disurvey. Kondisi dinding yang rusak adalah 133 (13,91%) rumah tangga, dan rusak berat sebanyak 63 (6,59%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Kondisi Dinding Rumah Responden
Menurut Klasifikasi Kondisi di TABAGSEL

Kondisi Dinding	Frequency	Percent
Baik	760	42,4
Rusak	133	48,4
Rusak Berat	63	6,59
Lainnya	-	-
Total	956	100,0

Tabel 5 memperlihatkan kondisi lantai rumah responden yang dilakukan survey. Rumah tangga yang memiliki kondisi lantai yang baik sebanyak 303 (31,69%) rumah tangga dari 956 rumah tangga yang disurvey. Kondisi lantai yang rusak adalah 458 (47,91%) rumah tangga, dan rusak berat sebanyak 192 (20,08%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan pada Tabel 6.

Tabel 5
Kondisi Lantai Rumah Responden Menurut
Klasifikasi Kondisi di TABAGSEL

Kondisi Lantai	Frequency	Percent
Baik	303	30,4
Rusak	458	59,4
Rusak Berat	192	10,2
Lainnya	4	-
Total	956	100,0

Sumber air minum 956 rumah tangga di TABAGSEL terbanyak bersumber dari air sungai yaitu 628 (65,69%) rumah tangga, mata air terlindung sebanyak 179 (18,72%) rumah tangga, mata air tak terlindung sebanyak 65 (6,80%) rumahTangga, dan sumur bor 62 (6,49%). Hal ini diperlihatkan pada Tabel 6.

Tabel 6
Sumber Air Minum Rumah Responden
Menurut Klasifikasi Sumber Air di TABAGSEL

Sumber Air Minum	Frequency	Percent
Pompa	4	0,42
Sumur Bor	62	6,49
Mata Air Terlindung	179	24,27
Mata Air Tak Terlindung	65	27,52
Air Sungai	628	40,59
Air Hujan	5	0,63
Lainnya	13	1,36
Total	956	100,0

Jenis penerangan 956 rumah tangga di Tabagsel terbanyak bersumber dari lampu minyak tanah yaitu 318 (33,26%) rumah tangga, PLN sebanyak 584 (61,09%) rumah tangga, Listrik desa 43 (4,50%), pertomak 11 (1,15%) rumah tangga. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 7.

Tabel 7
Jenis Penerangan Rumah Responden
Menurut Jenis Penerangan di TASBAGSEL

Jenis Penerangan	Frequency	Percent
Lampu Minyak Tanah	318	33,26
Petromax	11	1,15
Listrik Desa	43	4,50
PLN	584	61,09
Lainnya	-	-
Total	764	100,0

Fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh rumah tangga dari 956 responden di Tapanuli Bagian Selatan adalah tidak ada sebanyak 766 (80,13%) rumah tangga, 137 (14,33%) merupakan milik umum, dan 53 (5,54%) rumah tangga merupakan milik sendiri.. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 8.

Tabel 8
Fasilitas Tbab Menurut Kepemilikan
Rumah Responden

Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Tbab)	Frequency	Percent
Milik Sendiri	53	5,54
Milik Umum	137	14,33
Tidak Ada	766	80,13
Lainnya	-	-
Total	956	100,0

Pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Kabupaten Dairi memperlihatkan bahwa terdapat 365 (47,8%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk pendidikan. Sedangkan, untuk klasifikasi antara pengeluaran 2500 - 10000 tercatat sebanyak 127 (16,6%) rumah tangga. Dan antara pengeluaran 12000 - 20000 adalah sebanyak 97 (12,6%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 9.

Tabel 9
Nilai Pendidikan Rumah Responden
Menurut Klasifikasi Pengeluaran di TABAGSEL

Nilai Pendidikan (Rp)	Frequency	Percent
0	457	47,8
2500-10000	159	16,6
12000 - 20000	120	12,6
21000-30000	66	6,9
33000-40000	22	2,3
44500 - 50000	35	3,7
55000-10000	22	2,3
133000-200000	11	1,1
250000 - 340000	14	1,5
Missing System	16	1,7
Total	956	100

Pengeluaran transportasi yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan, terdapat 406 (42,5%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk transportasi. Untuk klasifikasi antara 1000 - 10000 sebanyak 177 (18,5%) rumah tangga. Dan antara 12000 - 20000 adalah sebanyak 218 (22,8%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 10.

Tabel 10
Nilai Transportasi Rumah Responden
Menurut Klasifikasi Pengeluaran di TABAGSEL

Nilai Transportasi (Rp)	Frequency	Percent
0	406	42,5
1000-10000	177	18,5
12000-20000	218	22,8
24000 - 30000	75	7,8
32000-40000	16	1,7
45000 - 50000	11	1,2
60000 - 300000	29	3,0
Missing System	24	2,5
Total	956	100,0

Pengeluaran untuk kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan, terdapat 599 (62,6%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk kesehatan. Untuk klasifikasi antara 2500 - 10000 sebanyak 72 (7,5%)

rumah tangga. Dan antara 12000 - 20000 adalah sebanyak 89 (9,3%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 11.

Tabel 11
Nilai Kesehatan Rumah Responden
Menurut Klasifikasi Pengeluaran di TABAGSEL

Nilai Kesehatan (Rp)	Frequency	Percent
0	599	62,6
2500-10000	72	7,5
12000-20000	89	9,3
25000 – 30000	57	6,0
32000-40000	14	1,5
45000 – 50000	13	1,4
60000-400000	24	2,5
Missing System	85	8,9
Total	956	100,0

Pengeluaran kebutuhan pokok ikan asin yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 157 (16,5%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk ikan asin. Untuk kiasifikasi antara 20000 - 40000 sebanyak 227 (23,7%) rumah tangga. Dan antara 45000 - 65000 adalah sebanyak 218 (22,8%) rumah tangga dan 70,000- 80,000 adalah 151 (15,8%). Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 12.

Tabel 12
Nilai ikan asin menurut rumah responden menurut klasifikasi
pengeluaran di Tabagsel

Nilai Ikan Asin (Rp)	Frequency	Percent
0	157	16,5
5000-16000	123	12,9
20000-40000	227	23,7
45000 - 65000	218	22,8
70000 - 85000	151	15,8
90000-100000	88	9,2
Missing System	-	-
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok daging yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 843 (88,2%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk daging dan 17 (1,8%) untuk pengeluaran daging katagori 30.000 – 90.000. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 13.

Tabel. 13
Nilai daging rumah responden menurut klasifikasi
Pengeluaran di Tabagsel

Nilai Daging (Rp)	Frequency	Percent
0	843	88,2
30000 – 90000	17	1,8
Missing System	94	9,8
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok telur yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 717 (75,0%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk telur. Untuk klasifikasi antara 100000 - 20000 sebanyak 75 (7,8%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 14.

Tabel. 14
Nilai telur rumah responden menurut klasifikasi pengeluaran di Tabagsel

Nilai Telur (Rp)	Frequency	Percent
0	717	75,0
10000-20000	75	7,8
20000 - 30000	45	4,7
30000-40000	13	1,4
40000 - 50000	11	1,1
Missing System	90	9,5
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok sayur yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 226 (23,6%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk sayur. Untuk klasifikasi pengeluaran antara 5000-20000 sebanyak 211 (22,1%), klasifikasi pengeluaran 25000 – 40000 sebanyak 248 (25,6%) dan kalsifikasi

pengeluaran 40.000-50.000 sebanyak 214 (22,4%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 15.

Tabel. 15
Nilai sayur rumah responden menurut klasifikasi
pengeluaran di Tabagsel

Nilai Sayur (Rp)	Frequency	Percent
0	226	23,6
5000 - 20000	211	22,1
25000-40000	248	25,6
50000-600000	214	22,4
60000-70000	45	4,7
70000 - 100000	9	0,9
Missing System	5	0,5
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok minyak tanah yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 57 (6,0%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk ikan asin. Untuk klasifikasi antara 5000 - 10000 sebanyak 333 (34,8,4%) dan klasifikasi pengeluaran 10000-20000 sebanyak 386 (40,4%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 16.

Tabel. 16
Nilai minyak tanah rumah responden menurut
Klasifikasi pengeluaran di Tabagsel

Nilai Minyak Tanah (Rp)	Frequency	Percent
0	57	6,0
5000-10000	333	34,8
10000-20000	386	40,4
20000-30000	97	10,1
30000-40000	58	6,1
40000-50000	18	1,9
Missing System	7	0,7
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok minyak goreng yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 81 (8,5%) rumah tangga yang tidak

melakukan pengeluaran untuk minyak goreng. Untuk klasifikasi pengeluaran antara 5000-10000 tercatat sebanyak 137 (14,3%), kalsifikasi 10000-20000 sebanyak 290 (30,3%) dan kalsifikasi pengeluaran 20000-30000 sebanyak 361 (37,8%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 17

Tabel 17
Nilai minyak goreng rumah responden menurut klasifikasi
Pengeluaran di Tabagsel

Nilai Minyak Goreng (Rp)	Frequency	Percent
0	81	8,5
5000-10000	137	14,3
10000-20000	290	30,3
20000-30000	361	37,8
30000-40000	65	6,8
40000-50000	15	1,6
Missing System	5	0,5
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok beras yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 25 (2,7%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk beras. Untuk klasifikasi antara 40000 - 60000 sebanyak 276 (28,9%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 18.

Tabel 18
Nilai beras rumah responden menurut klasifikasi
Pengeluaran di Tabagsel

Nilai Beras (Rp)	Frequency	Percent
0	26	2,7
5000 - 10000	13	1,4
10000-20000	123	12,9
20000-30000	228	23,9
30000 - 40000	176	18,4
40000 - 60000	276	28,9
60000 - 70000	27	2,9
70000-90000	56	5,9
90000 - 100000	22	2,3
Missing System	4	0,4
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok gula yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 52 (5,4%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk gula. Untuk klasifikasi terbesar adalah antara 20000-30000 sebanyak 475 (49,7%) rumah tangga. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 19.

Tabel 19
Nilai gula rumah responden menurut klasifikasi
Pengeluaran di tabagsel

Nilai Gula (Rp)	Frequency	Percent
0	52	5,4
5000-10000	15	1,6
10000-20000	251	26,3
20000-30000	475	49,7
30000-40000	134	14,0
40000-50000	23	2,4
Missing System	5	0,5
Total	956	100

Pengeluaran kebutuhan pokok ikan basah yang dikeluarkan oleh rumah tangga responden di Tapanuli Bagian Selatan , terdapat 567 (59,3%) rumah tangga yang tidak melakukan pengeluaran untuk ikan basah. Untuk klasifikasi antara 10000 - 30000 sebanyak 114 (11,9%) rumah tangga. Antara 30000 - 50000 sebanyak 143 (15,0%) rumah tangga yang melngeluarkan untuk ikan basah. Keadaan ini diperlihatkan oleh Tabel 20.

Tabel 20
Nilai ikan basah rumah responden menurut
Klasifikasi pengeluaran di Tabagsel

Nilai Ikan Basah (Rp)	Frequency	Percent
0	567	59,3
10000 - 30000	114	11,9
30000 - 50000	143	15,0
50000-80000	40	4,2
Missing System	91	9,5
Total	956	100

6. Fasilitas Kesehatan

Hasil survey lapangan di 5 Kabupaten yang ada di Tabagsel memperlihatkan bahwa kualitas gedung puskesmas di hampir semua Kabupaten dalam kondisi yang baik, hanya di Kabupaten Paluta dan Tapsel yang kualitas gedung puskesmasnya rusak. Kondisi gedung tersebut disajikan pada Tabel 21.

Tabel. 21
Kualitas gedung puskesmas menurut
Kabupaten/kota di Tabagsel

No	KECAMATAN	BAIK	RUSAK	TOTAL
1	Kab. Tapanuli Selatan	12	2	14
2	Kab. Mandailing Natal	20	-	20
3	Kab. Padang Lawas Utara	9	2	11
4	Kab. Padang Lawas	11	-	11
5	Kota Padang Sidempuan			
	JUMLAH PUSKESMAS	52	4	56

Tabel 21 memperlihatkan kondisi atap puskesmas di 5 Kabupaten/kota berada dalam kondisi baik. Sedangkan kondisi lantai terdapat dua klasifikasi yaitu 38 puskesmas berlantai semen dengan 1 puskesmas berkondisi rusak dan 17 puskesmas berlantai jubin. Kondisi dinding secara keseluruhan sudah permanen yaitu 54 puskesmas dan hanya 2 puskesmas yang ber dinding semi permanen dan dalam kondisi rusak. Perabotan yang terdapat di 56 puskesmas adalah baik dan 3 puskesmas berkondisi rusak. Sedangkan kondisi penerangan 53 puskesmas menunjukkan keadaan yang baik, 2 puskesmas dalam kondisi rusak dan 1 puskesmas juga ber kondisikan rusak berat.

Tabel. 22
Kondisi atap, lantai, dinding, perobatan dan
penerangan puskesmas di Tabagsel

KONDISI GEDUNG	BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	TOTAL
ATAP : Seng	54	1	1	56
LANTAI: Semen	38	1	-	37
Jubin	17	-	-	17
DINDING : Semi Permanen	2	-	-	2
Permanen	54	-	-	54
PERABOTAN	54	2	-	56
PENERANGAN	53	2	1	56

Jumlah staf medis di Tabagsel dengan klasifikasi staf medis memperlihatkan adalah dokter berjumlah 110 orang, dokter gigi berjumlah 26 orang, bidan berjumlah 910 orang, dan 812 orang perawat. Keadaan ini diperlihatkan pada Tabel 23 berikut:

Tabel. 23
Jumlah paramedis dan non paramedis puskesmas
di Tabagsel

No	KECAMATAN	Dokter	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Dokter Spesialis
1	Kab. Tapanuli Selatan	25	6	300	139	2
2	Kab. Mandailing Natal	27	6	100	182	13
3	Kab. Padang Lawas Utara	15	2	260	150	-
4	Kab. Padang Lawas	15	1	202	112	-
5	Kota Padang Sidempuan	28	10	148	229	11
	JUMLAH	110	25	910	812	26

Jumlah *provider* (petugas kesehatan) dan pasien puskesmas menunjukkan bahwa jumlah *provider* di Tabagsel adalah 596 orang dengan pasien rawat jalan rata-rata per hari sebanyak 1154 orang, dan jumlah pasien rawat inap rata-rata per hari sebanyak 190 orang. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 24 berikut:

Tabel. 24
Jumlah provider dan pasien puskesmas menurut
Kabupaten/kota di Tabagsel

No	Kecamatan	Jumlah Provider	Jlh Pasien Rawat Jalan rata2/hari	Jlh Pasien Rawat Inap rata2/hari
1	Kab. Tapanuli Selatan	117	122	6
2	Kab. Mandailing Natal	123	132	52
3	Kab. Padang Lawas Utara	67	63	5
4	Kab. Padang Lawas	76	73	4
5	Kota Padang Sidempuan	213	168	132
	JUMLAH	596	1154	199

Berdasarkan Tabel 25 berikut memperlihatkan rata-rata jumlah hari pelayanan per minggu puskesmas di Tabagsel adalah 6,2 hari per minggu dengan rata-rata jumlah jam pelayanan per hari 10 jam. Kota Padang Sidempuan rata-rata jumlah hari pelayanan per minggu adalah 7 hari dengan jumlah rata-rata pelayanan per hari 24 jam. Sedangkan 4 kabupaten lainnya a jumlah hari pelayanan per minggu adalah 6 hari dengan jumlah rata-rata pelayanan per hari 14 jam.

Tabel 25
Rata-rata jumlah hari dan jam pelayanan puskesmas
menurut kabupaten/kota di Tabagsel

No	Kecamatan	Rata-rata Jumlah Hari Pelayanan / minggu	Rata-rata Jumlah Jam Pelayanan /hari
1	Kab. Tapanuli Selatan	6	18
2	Kab. Mandailing Natal	6	18
3	Kab. Padang Lawas Utara	6	12
4	Kab. Padang Lawas	6	8
5	Kota Padang Sidempuan	7	24
	RATA-RATA	6,2	16

Berikut Tabel 26 memperlihatkan ketersediaan obat dan jarum suntik puskesmas di Tapanuli Bagian Selatan. Dari 56 puskesmas, hanya 24 puskesmas memiliki antibiotik dan obat lainnya dengan ketersediaan sangat cukup, 12 puskesmas cukup, 18 puskesmas tidak cukup dan 2 puskesmas sangat tidak cukup.

Tabel 26
Ketersediaan obat dan jarum suntik puskesmas
di Tabagsel

KETERSEDIAAN	Antibiotik	Obat lainnya	Jarum Suntik
SANGAT CUKUP	24	24	24
CUKUP	12	12	12
TIDAK CUKUP	18	18	18
SANGAT TIDAK CUKUP	2	2	2
JUMLAH PUSKESMAS	56	56	56

Berdasarkan Tabel 27 menunjukkan bahwa dari 56 puskesmas yang terdapat di Tabagsel menyatakan kecukupan peralatan emergency 32 puskesmas dan 24 puskesmas tidak. Sedangkan kecukupan obat emergency 40 puskesmas dan 16 menyatakan tidak. Sedangkan berkenaan dengan system rujukan memperlihatkan bahwa 48 puskesmas yang telah memfungsikan system rujukan dan hanya 8 puskesmas yang tidak.

Tabel 27
Kecukupan peralatan dan obat untuk emergencyserta sistem
rujukan puskesmas di Tabagsel

Kecukupan Peralatan & Obat	Ya	Tidak	Jlh Puskesmas
Kecukupan Peralatan Emergency	32	24	56
Kecukupan Obat Emergency	40	16	56
Sistem Rujukan Berflingsi	48	8	56

7). Fasilitas Pendidikan

Dari hasil survey lapangan di lima (5) kabupaten/kota yang ada di Tabagsel memperlihatkan kualitas gedung sekolah dasar yang sangat bervariasi (Tabel 28). Kualitas gedung sekolah dasar yang memprihatinkan adalah yang terdapat di kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal masing-masing 2 SD dan Kabupaten Paluta, Palase dan kota Padang Sidempuan masing-masing 1 SD. SD yang diklasifikasikan baik 1119 (95%) dari

1183 SD. Sedangkan yang rusak ringan 57 (4,8%) dan rusak berat 7 (0,2%) dari 1183 SD se Tabagsel.

Tabel 28
Kualitas gedung sekolah dasar menurut kecamatan
di Tabagsel

No	KECAMATAN	BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	JUMLAH SD
1	Kab. Tapanuli Selatan	304	23	2	329
2	Kab. Mandailing Natal	361	18	2	381
3	Kab. Padang Lawas Utara	231	8	1	240
4	Kab. Padang Lawas	138	6	1	145
5	Kota Padang Sidempuan	85	2	1	88
	JUMLAH SD	1119	57	7	1183

Dari hasil survey secara keseluruhan terhadap kualitas gedung sekolah dasar yaitu berjumlah 1183 gedung sekolah dasar di Tabagsel menggambarkan atap yang digunakan adalah seng dengan keadaan baik sebesar 95 persen (1119 sekolah dasar), kondisi rusak sebesar 4,8 persen (57 sekolah dasar), dan 0,2 persen (7 sekolah dasar) dalam kondisi rusak berat. Sedangkan kondisi lantai telah menggunakan semen dengan klasifikasi sebesar 95 persen (1119 sekolah dasar) dalam kondisi baik, 4,8 persen (57 sekolah dasar) dalam kondisi rusak dan, 0,2 persen (7 sekolah dasar) dalam kondisi rusak berat. Sedangkan keadaan dinding sekolah berada pada kondisi semi permanen dengan klasifikasi kualitas yaitu 25 persen (15 sekolah dasar) dalam kondisi baik, 63,33 persen rusak (38 sekolah dasar) dalam keadaan rusak, dan 11,67 persen (7 sekolah dasar) dalam kondisi rusak berat. Dan dinding permanen 98,31 persen (1104 sekolah dasar) berada dalam kondisi baik, 1,69 persen (19 sekolah dasar) dalam keadaan rusak. Keadaan ini diperlihatkan pada Tabel 29.

Tabel. 29
Kondisi atap, lantai, dinding, perabotan dan penerangan
sekolah dasar di Tabagsel

KONDISI GEDUNG SD	BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	JUMLAH SD
ATAP: Seng	1119	57	7	1183
LANTAI: Semen Keramik	1119	57	7	1183
DINDING : Semi Permanen Permanen	15 1104	38 19	7 -	60 1123
MEJA DAN KURSI	1160	23	-	1183
PENERANGAN	960	180	63	1183

Tabel 30 juga memperlihatkan 98 persen sekolah dasar yang memiliki fasilitas meja dan kursi dalam kondisi yang baik sedangkan lainnya berada dalam kondisi yang perlu perhatian serius, yaitu 2 persen rusak. Sedangkan fasilitas penerangan memperlihatkan 81,15 persen dalam kondisi baik dan 8,85 persen dalam kondisi rusak.

Tabel. 30
Jumlah guru, murid, dan ruang kelas sekolah dasar
menurut kabupaten/kota di Tabagsel

No	KECAMATAN	JUMLAH SD	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	JUMLAH RUANG
1	Kab. Tapanuli Selatan	274	1885	50151	1696
2	Kab. Mandailing Natal	381	2674	65352	2510
3	Kab. Padang Lawas Utara	201	1345	36770	1258
4	Kab. Padang Lawas	198	1265	35648	1242
5	Kota Padang Sidempuan	88	1292	27686	842
	JUMLAH	1142	7761	215607	7548

Berdasarkan Tabel 31 memperlihatkan bahwa rata-rata di lima kabupaten/kota mempunyai rasio kelas, guru yang cukup idial. Rata-rata Sekolah Dasar mempunyai murid 189 orang, rata-rata perkelas mempunyai murid 29 siswa dan rata-rata guru memiliki siswa sebanyak 28 siswa.

Tabel 31
Jumlah guru yang mendapat sertifikasi dan jumlah murid yang mendapat beasiswa sekolah dasar menurut kabupaten/kota di Tabagsel

No	KABUPATEN	JLH GURU TO-TAL	JLH GURU DAPAT SERTIFIK	JLH MURID D TOTA	JLH MURID DAPAT DANA BOS
1	Kab. Tapanuli Selatan	274	165	50151	50151
2	Kab. Mandailing Natal	381	230	65352	65352
3	Kab. Padang Lawas Utara	201	120	36770	36770
4	Kab. Padang Lawas	198	118	35648	35648
5	Kota Padang Sidempuan	88	52	27686	27686
	JUMLAH	1142	685	215607	215607

Dari Jumlah guru yang berada di Tabagsel menunjukkan 685 orang yang telah mendapat sertifikasi dari jumlah guru 1142 orang atau rata-rata 60% kecuali di kota Padang Sidempuan telah mencapai 70%. Sedangkan dana Bos yang disalurkan mencapai 100% dari jumlah siswa. Namun sebahagian kecil dari Sekolah Dasar masih mengutip dana seperti dana ujian, pembelian buku.

8). Observasi Komunitas

Observasi komunitas ini dilakukan di 27 kecamatan di Tapanuli Bagian Selatan (5 Kabupaten/kota) dengan klasifikasi 16 kelurahan dan 51 desa sample. Dengan demikian jumlah sample observasi berjumlah 67 desa dan kelurahan. Data ini untuk melengkapi data yang sudah tersedia pada BPS yaitu Kabupaten/kota dalam angka. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32
Jumlah sampel desa/kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Tabagsel

No	KECAMATAN	KECAMATAN	DESA/KE-LURAHAN	JUMLAH
1	Kab. Tapanuli Selatan	5	3	15
2	Kab. Mandailing Natal	8	3	24
3	Kab. Padang Lawas Utara	4	2	8
4	Kab. Padang Lawas	4	2	8
5	Kota Padang Sidempuan	6	2	12
	JUMLAH	27	12	67

Berdasarkan jumlah sample tersebut memberikan gambaran mengenai ketersediaan sekolah TK, SD, dan SLTP di setiap kabupaten . Hal ini dapat diperlihatkan pada Tabel 33.

Tabel 33
Ketersediaan TK, SD, dan SMP menurut Kecamatan di Tabagsel

NO	KECAMATAN	TK		S		D		SLT		P	
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	Kab. Tapanuli Selatan	5	6	274	-	32	-	-	-	-	-
2	Kab. Mandailing Natal	10	13	381	-	65	-	1	-	-	-
3	Kab. Padang Lawas Utara	2	6	201	-	24	-	-	-	-	-
4	Kab. Padang Lawas	2	7	198	-	27	-	-	-	-	-
5	Kota Padang Sidempuan	8	2	88	-	27	-	-	-	-	-
	JUMLAH	275	34	1142	-	175	-	1	-	-	-

Dari hasil observasi komunitas ini juga menggambarkan ketersediaan fasilitas pasar, bank, dan koperasi menurut kabupaten/kota yang diperlihatkan pada Tabel 34. Kondisi ini diperlihatkan pada Tabel 34.

Tabel 34
Ketersediaan Pasar, Bank, Koperasi, Rentenir Menurut Kecamatan di Tabagsel

NO	KECAMATAN	PASAR		BANK		KOPERASI	
		Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk
1	Kab. Tapanuli Selatan	15	2	5	4	33	2
2	Kab. Mandailing Natal	30	7	6	8	61	7
3	Kab. Padang Lawas	7	2	5	6	18	5
4	Kab. Padang Lawas	7	3	4	7	15	8
5	Kota Padang Sidempuan	10	-	12	-	176	-
	JUMLAH	69	14	32	25	303	22

Berdasarkan Tabel 35 memberikan gambaran bahwa rata-rata kecamatan di lima kabupaten/kota telah tersedia sarana angkutan baik yang menggunakan bus besar maupun mini bus untuk angkutan kota dan antar kota kecamatan, becak sebagai sarana angkutan dalam kota dan ojek.

Tabel 35
Ketersediaan sarana angkutan umum
menurut kabupaten di Tabagsel

NO	KECAMATAN	Bus		Mini Bus		Becak		Ojek	
		Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk
1	Kab. Tapanuli Selatan	8	-	582	-	1563	-	876	-
2	Kab. Mandailing Natal	8	-	869	-	967	-	945	-
3	Kab. Padang Lawas Utara	8	-	345	-	820	-	423	-
4	Kab. Padang Lawas	6	-	289	-	323	-	435	-
5	Kota Padang Sidempuan	8	-	3462	-	3456	-	165	-
	JUMLAH	38	-	5547	-	7129	-	2844	-

Tabel 36 menggambarkan ketersediaan sarana informasi dan komunikasi di setiap kecamatan di Tabagsel adalah belum merata ke setiap kecamatan atau ke desa. Tetapi, secara keseluruhan hampir memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan sarana komunikasi baru terbatas pada kecamatan yang sudah lama berdiri, sedangkan kecamatan dan desa yang baru dimekarkan masih sangat terbatas.

Tabel 36
Ketersediaan sarana informasi dan komunikasi
Menurut Kabupaten di Tabagsel

NO	KECAMATAN	TEL		PON		WARTEL		KORAN		POS	
		Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk
1	Kab. Tapanuli Selatan	8	3	6	3	5	6	7	6		
2	Kab. Mandailing Natal	12	11	14	9	5	10	10	13		
3	Kab. Padang Lawas Utara	11	5	6	2	5	3	4	4		
4	Kab. Padang Lawas	6	2	5	4	5	4	2	7		
5	Kota Padang Sidempuan	4	-	2	16	5	-	23	-		
	JUMLAH	41	21	23	34	25	23	46	20		

Mengenai ketersediaan fasilitas listrik dan air bersih di setiap desa di lima kabupaten/kota dari 56 kecamatan dan 573 desa/kelurahan menunjukkan bahwa ketersediaan listrik hampir merata di setiap kecamatan. Terdapat 95 desa (5,7%) dari seluruh desa 1643 yang belum dialiri listrik. Sedangkan air bersih yang dikelola pemerintah baru terbatas pada kelurahan di ibukota kabupaten dan kecamatan. Terdapat 437 (26,6%) desa yang telah

mendapat fasilitas air bersih, sedangkan sisanya menggunakan sumur atau air sungai. Seperti tergambar dalam Tabel. 37.

Tabel. 37
Ketersediaan listrik dan air bersih menurut
Kabupaten/Kota di Tabagsel

NO	KECAMATAN	Listrik		Air Bersih	
		Ada	Tdk	Ada	Tdk
1	Kab. Tapanuli Selatan	446	23	112	357
2	Kab. Mandailing Natal	344	32	136	240
3	Kab. Padang Lawas Utara	321	18	46	293
4	Kab. Padang Lawas	358	22	64	316
5	Kota Padang Sidempuan	79	-	79	-
	JUMLAH	1548	95	437	1206

Berdasarkan hasil obesrvasi komunitas memperlihatkan kabupaten yang memiliki komposisi penduduk miskin hampir rata di semua kabupaten kecuali kota Padang Sidempuan dengan 12,22 % dari jumlah penduduk. Sedangkan di Madina 20,40 % dan 3kabupaten lainnya berkisar 24 %. Penduduk Kaya juga ditempati Kota Pang Sidempuan sebesar 24,50 % dari jumlah peneduduk dan 4 kabupaten lainnya rata-rata 17 %. Penduduk menengah rata-rata di Tabagsel 60%. Tabel 38 di bawah ini memperlihatkan keadaan tersebut.

Tabel. 38
Rata-rata persentase penduduk kaya, menengah dan miskin
menurut kabupaten/kota di Tabagsel

No	KECAMATAN	KAYA	MENENGAH	MISKIN	TOTAL
1	Kab. Tapanuli Selatan	17,5	58,33	24,17	100,0
2	Kab. Mandailing Natal	17,6	62,00	20,40	100,0
3	Kab. Padang Lawas Utara	16,7	57,87	25,43	100,0
4	Kab. Padang Lawas	17,0	59,55	23,45	100,0
5	Kota Padang Sidempuan	24,50	53,28	12,22	100,0
	PERSENTASE RATA-RATA	18,66	58,21	21,13	100,0

B. Pembahasan.

B.1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata kepala keluarga miskin tidak mempunyai aset lahan untuk usaha pertanian yaitu 238 KK (31,2 persen), tidak mempunyai kebun 217 KK (28,4 persen), tidak mempunyai tambak 758 KK (99,2 persen), dan tidak mempunyai tanah pekarangan sebanyak 691 KK (90,4 persen). Sebanyak 197 KK (25,8 persen) bekerja sebagai upahan (buruh tani, buruh bangunan, mocok-mocok).

Disamping itu pada umumnya kepala keluarga tidak mempunyai ternak untuk dijadikan objek pendapatan yaitu 761 KK tidak mempunyai sapi, 754 KK tidak mempunyai kerbau, 749 KK tidak mempunyai kambing dan 633 KK tidak mempunyai ternak ayam dan itik. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan hal ini sejalan dengan pendapat Todaro yang mengatakan bahwa seseorang itu miskin karena dia miskin, artinya adalah bahwa seorang itu miskin karen dia tidak punya sumber daya/factor produksi.

Keadaan ini diperparah lagi dengan tingkat pendidikan masih sangat rendah dimana 248 KK (32,5 persen) tidak tamat SD, dan tamat SD 384 KK (50,3 persen), dan hanya 4 KK (0,5 persen) yang menamatkan diploma, serta tidak seorangpun diantara mereka yang menamatkan S1. Faktor internal yang tidak kalah pentingnya penyebab kemiskinan di Tabagsel adalah sesuai dengan (hasil essay RT) disimpulkan bahwa mereka tidak mau beralih ke sektor lain (tetap di sektor pertanian tradisional), pemerintah banyak memberi janji yang tidak terwujud, tidak terintegrasi (terpadu) dalam intervensi pemerintah tetapi secara parsial dari 49 mengungkapkan persoalan yang dihadapi, cepat puas, dan pesimis, serta etos kerja yang masih kurang, pupuk yang tidak tersedia. Fenomena inilah yang memicu kemiskinan di Tabagsel jika dilihat dari kondisi internal masyarakat.

B.2. Faktor Eksternal

Jika dilihat dari faktor eksternal, kemiskinan di Tabagsel dipicu oleh : Jumlah dokter yang bertugas di Puskesmas masih kurang rata-rata hanya tersedia seorang dokter setiap puskesmas, 30 puskesmas tidak mempunyai dokter gigi, hanya ada 32 Puskesmas yang mempunyai bidan dari 56 puskesmas yang diteliti. Ketersediaan obat-obatan dan jarum suntik masih kurang cukup didapati pada 12 puskesmas dari 56 puskesmas yang diteliti.

Yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan fasilitas pendidikan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kondisi bangunan SD umumnya baik, hanya yang rusak 5% dan rusak berat 0.5% Rasio murid dengan guru secara total telah baik yakni 1 orang guru berbanding dengan 28 murid. Namun rasio ini tidak menyebar secara merata di semua kecamatan, sehingga ada kecamatan seperti kecamatan di Paluta dan Palas rasionya adalah 1:40. Jumlah murid yang mendapat beasiswa cukup signifikan yakni 85 % dari dan BOS, baik SD maupun SLTP. Jumlah pendapatan sekolah dari dana BOS hampir merta diseluruh sekolah yang diteliti, namun masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan sekolah..

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

a. Faktor Internal

1. Rata-rata kepala keluarga miskin tidak mempunyai aset lahan untuk usaha pertanian yaitu 238 KK (31,2 persen), tidak mempunyai kebun 217 KK (28,4 persen), tidak mempunyai tambak 758 KK (99,2 persen), dan tidak mempunyai tanah pekarangan sebanyak 691 KK (90,4 persen). Sebanyak 197 KK (25,8 persen) bekerja sebagai upahan (buruh tani, buruh bangunan, mocok-mocok).
2. Umumnya kepala keluarga tidak mempunyai ternak untuk dijadikan objek pendapatan yaitu 761 KK tidak mempunyai sapi, 754 KK tidak mempunyai kerbau, 749 KK tidak mempunyai kambing dan 633 KK tidak mempunyai ternak ayam dan itik..
3. Tingkat pendidikan masih sangat rendah dimana 248 KK (32,5 persen) tidak tamat SD, dan tamat SD 384 KK (50,3 persen), dan hanya 4 KK (0,5 persen) yang menamatkan diploma, serta tidak seorangpun diantara mereka yang menamatkan S1.
4. Faktor internal yang terakhir secara umum (hasil essay RT) disimpulkan bahwa mereka tidak mau beralih ke sektor lain (tetap di sektor pertanian tradisional), pemerintah banyak memberi janji yang tidak terwujud, tidak terintegrasi (terpadu) dalam intervensi pemerintah tetapi secara parsial dari 49 mengungkapkan persoalan yang dihadapi, cepat puas, dan pesimis, serta etos kerja yang masih kurang, pupuk yang tidak tersedia.

B. Faktor Eksternal

1. Fasilitas Kesehatan

- a. Jumlah dokter yang bertugas di Puskesmas masih kurang rata-rata hanya tersedia seorang dokter setiap puskesmas, 30 puskesmas tidak mempunyai dokter gigi, hanya ada 32 Puskesmas yang mempunyai bidan dari 56 puskesmas yang diteliti.
- b. Ketersediaan obat-obatan dan jarum suntik masih kurang cukup didapati pada 12 puskesmas dari 56 puskesmas yang diteliti.

2. Fasilitas Pendidikan

- a. Kondisi bangunan SD umumnya baik, hanya yang rusak 5% dan rusak berat 0.5%
- b. Rasio murid dengan guru secara total telah baik yakni 1 orang guru berbanding dengan 28 murid. Namun rasio ini tidak menyebar secara merata di semua kecamatan, sehingga ada kecamatan seperti kecamatan di Paluta dan Palas rasionya adalah 1:40
- c. Jumlah murid yang mendapat beasiswa cukup signifikan yakni 85 % dari dana BOS, baik SD maupun SLTP.
- d. Jumlah pendapatan sekolah dari dana BOS hampir merta diseluruh sekolah yang diteliti, namun masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan sekolah..

3. Observasi Komunitas

- a. Dari 5 Kabupaten/Kota yang diobservasi, 45,7 persen tidak mempunyai sekolah TK sebagai pengembangan bakat dan minat sejak dini dalam pengembangan sumber daya manusia.
- b. Sebanyak 25,8 persen tidak mempunyai pasar, 23,3 persen tidak mempunyai koperasi, dan 24,5 persen dijumpai adanya Bank

- c. Sebanyak 15,3 persen tidak mempunyai bus besar angkutan umum, dan 23,7 persen tidak ada becak.

B. Saran

1. Solusi Internal adalah memberikan bantuan terhadap keluarga miskin dari sudut aset yang dimiliki seperti, lahan pertanian, perlengkapan dan peralatan usaha, modal usaha, distribusi pupuk, memotivasi etos kerja, dan meyiapkan sumber daya manusia sedini mungkin untuk program jangka panjang.
2. Solusi Eksternal adalah membangun infrastruktur (fisik dan non fisik) sarama jalan, sarana ekonomi, dan pendidikan, kesehatan, yang dibutuhkan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu (interorganisational)
3. Penyaluran pupuk yang merupakan kebutuhan pokok bagi petani harus mendapat perhatian pemerintah daerah, selain harga yang terlalu tinggi bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Asain Development Bank, 1998. *Fighting Poverty In Asia and the Pacific : The Poverty Reduction Strategi*, Pacific Public Management Program, Module Two.
- Bangladesh Rural Advancement Committee. 1996. *The Net Power Structure un The Villages*, BRAC Prokashana Pbulisher.
- Bappenas-Yayasan Agro Ekonomika. 1996. *Menuju Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan, Ringkasan Eksekutif*.
- Behrman, J. 1990, *The Action of Human Resources and Poverty on One Another*, The World Bank, LSMS Working Paper N.74.
- Chambers R. 1983. *Rural Development : Putting the Last First*, Longman Scientific & Technical, Essex, England.
- _____. 1981, "Rapid rural appraisal : rationale and repertoire," *Public Administration and Development*, Vol. I. 1, 95-106, Jhon Wiley & Sons, Ltd.
- Cohen, GA, 1993, "Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilities," *The Quality of Life*, Ed. Marha Nussbaum and KA. K.Sen, Claredon Pres, Oxford.
- De Vos, K. 1991. *Micro-economic Definitions of Poverty*, Dissertation, Erasmus University Rotterdam, Departement of Economic Sociology and Psychology.
- Grootaert, S, And R. Kanbur. 1990. *The Policy Oriented Analysis of Poverty and the social dimensions of structural adjustment : Al-Qur'an Methodology and Proposal Application to Cote d'ivoire, 1985-88*, The World Bank, SDA Working Paper Series.
- Hagenaars, A. J. M. 1986. *The Perception of Poverty*, North Holland, Amsterdam.
- Hagenaars, A. J. M. And Klaas de Vos. 1986. "The Definition and Measurement of Poverty," *The Journal of Human Resources*, Vol. 23, No. 2, The Measurement of Wisconsin Press.
- Kapteyn , A., Kooreman P., and Willemse R. 1998, "Some Methodological Issues in the Implementation of Subjective Poverty Definitions" *The Journal of Human Resources*, Vol. 23 No. 2, The University of Wisconsin Press.
- Masbar, R. 1993. *Proverty Redution Policy in Acheh*, Paper (in Indonesia Language) Presented in a Seminar of Proverty at Syiah Kuala University.
- _____. 1995. *Proverty Line Based on Micro-Economic Foundation*, Paper (in Indonesia Language) Presented in a Seminar of Business and Economics at University of Bengkulu.

Lawrence, M. 1991. *Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures*, The World Bank, LSMS-Working Paper No. 83

_____. 1992, *Poverty Comparisons : A Guide to Concepts and Methods*, The World Bank, LSMS-Working Paper No. 88

Sayoga. 1993. "Pemikiran tentang kemiskinan di indonesia.", No. 3 Tahun XII, LP3ES.

Sebright, P. 1993. "Pluralism and the standart of living", *The Quality of Life*, Ed, Martha Nussbaum and A.K.Sen, Clarendon Press, Oxford.

Sen, A.K. 1998. *The Standart of Living*, Chamridge University Press.

_____. 1993. "Capability and Well-Being", *The Quality of Life*, ED. MarthaNussbaum and A.K. Sen, Clarendon Press, Oxford.

Stukel, T., Haker B., Michelwait D., Diqiovanna D., and McCary 1, 2000, *Restoring Security and Economic Development in Aceh*, USAID Internal Report.

Syahnur, Sofyan. 2001. *Income Distribution Between Agricultural and Nonagricultural Sector in The Special Provice of Aceh*, Thesis, Gadjah Mada University of Economics and Development.

World Bank. 1990. *Word Development Report, Poverty*, Oxford University Press.